

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beragam habitat perairan yang terdapat di Indonesia, termasuk sungai, danau, pesisir, dan laut, menopang sumber daya perikanan yang memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi negara ini. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dan menciptakan lapangan kerja bagi kota-kota pesisir, industri perikanan sangat penting. Lebih jauh lagi, industri ini menyediakan sebagian besar protein hewani dan nabati yang dibutuhkan untuk kesehatan manusia.

Indonesia memiliki jumlah pulau kurang lebih 13.000 pulau beberapa diantaranya belum mempunyai nama dan berpenghuni serta memiliki garis panjang pantai terpanjang ketiga didunia yaitu kurang lebih 81.000 km¹. Berdasarkan kedaulatan Indonesia, perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) membentang seluas 2,7 juta km², sedangkan perairan teritorial negara ini membentang seluas 3,1 juta km². Secara geografis, Indonesia terletak di persimpangan rute perdagangan internasional yang menghubungkan Benua Asia dan Australia, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Industri maritim memiliki prospek yang sangat baik bagi pembangunan ekonomi nasional dan memainkan peran penting dalam perdagangan internasional karena lokasinya yang strategis.²

¹ Agus, A. (2018). Marine/Fisheries Resource Using (Case Study Ternate Manucipality, North Molucca). *TORANI: Journal of Fisheries and Marine Science*, 1(2), 93–102. <https://doi.org/10.35911/torani.v1i2.4511>

² Sarah, amira rasyida, I. (2019). Bab 1 pendahuluan. *Pelayanan Kesehatan*, 2015, 3–13. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23790/4/Chapter I.pdf>

Menurut Sistem & Gizi, ikan merupakan bahan pangan yang mengandung protein, sumber energi (hingga 17%), dan zat gizi penting lainnya. Menurut Pasal 1 UU Perikanan 45 tahun 2009, ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Karena mudah dicerna dan memiliki kandungan asam amino yang hampir sama dalam tubuh manusia, ikan merupakan sumber makanan berprotein tinggi yang sangat dibutuhkan manusia. Ikan perlu ditangani dengan hati-hati setelah ditangkap atau dipanen karena kandungan airnya yang tinggi (70–80%), yang membuatnya rentan terhadap kerusakan.

Makan ikan bukanlah budaya di sebagian besar wilayah Indonesia, meskipun potensi dan pemanfaatan sumber daya perikanan air tawar, air payau, dan laut tergolong tinggi. Kenyataannya, masyarakat Indonesia mengonsumsi ikan jauh lebih sedikit dibandingkan masyarakat di negara lain yang potensi sumber daya perikananannya jauh lebih sedikit. Dengan luas wilayah hampir 85% Pulau Sumatera, Jepang memiliki garis pantai sepanjang 29.751 km dan wilayah perairan seluas 3.091 km². Konsumsi ikan tahunan di negara ini adalah 140 kilogram per orang. Sebaliknya, Korea Selatan dan Malaysia, dua negara tetangga dengan garis pantai masing-masing sepanjang 2.413 km dan 6.475 km, mengonsumsi 70 dan 80 kg makanan laut per kapita setiap tahunnya (Setyorini, 2007)³. Hal ini berbeda

³ Djunaidah, I. S. (2017). Tingkat konsumsi ikan di Indonesia. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 11(1), 12–24.

dengan situasi di Indonesia, di mana sumber makanan berbasis laut belum dikenal atau dikonsumsi secara merata di seluruh negeri.

Tingkat konsumsi ikan oleh penduduk Indonesia, dinyatakan dalam kilogram per kapita per tahun, yang kini disebut sebagai "Angka Konsumsi Ikan." Menurut sebuah studi menarik tentang konsumsi ikan yang dilakukan pada tahun 2014 oleh Suryadiana dkk., suku Bugis mengonsumsi lebih banyak ikan daripada suku Sunda, meskipun kedua kelompok tersebut tinggal di wilayah yang sama yaitu Waduk Cirata. Konsumsi ikan menyumbang rata-rata 67,9% dari tingkat kecukupan protein suku Bugis, dibandingkan dengan 25,8% untuk suku Sunda. Bagi suku Sunda dan Bugis, ikan masing-masing menyumbang 7,2% dan 15,9% dari tingkat kecukupan energi. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam kebiasaan makan ikan atau pola konsumsi menurut suku atau etnis, atau mungkin lebih khusus lagi, tempat asal. Suku Bugis, yang keterampilan berlayarnya yang luar biasa telah ditunjukkan sepanjang sejarah, lebih terbiasa memakan ikan sebagai bagian dari budaya bahari mereka.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Indonesia mengatur segala hal mulai dari jenis dan bentuk usaha perikanan hingga penindakan pelanggaran. Padahal, 75% wilayah Indonesia adalah lautan, namun selama ini masalah perikanan kurang mendapat perhatian karena lebih banyak diprioritaskan pada sektor pertanian. Tentu saja, program pembangunan perikanan pemerintah kurang maksimal sebagai bagian dari sektor pertanian. Hal itu juga bisa jadi salah satu faktor rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia.

Kesadaran akan pentingnya konsumsi ikan mencapai puncaknya dengan dikeluarkannya UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang pangan yang menekankan pembangunan ketahanan pangan harus berbasis pada kemandirian dan kedaulatan pangan. Dan ditegaskan juga pada Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting ditetapkan ikan sebagai barang kebutuhan pokok. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden (PERPRES) ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur penyediaan ikan agar dapat menjaga ketersediaan ikan yang cukup, bermutu tinggi, dan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Presiden Megawati Soekarnoputri meluncurkan inisiatif Gerakan Membudayakan Makan Ikan (GEMARIKAN) pada tahun 2004. Tujuan dari program ini adalah untuk mempromosikan lebih banyak makan ikan di kalangan masyarakat Indonesia. Inisiatif ini menggalakkan konsumsi ikan di semua lapisan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat kecerdasan dan kesehatan masyarakat. Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) yang dibentuk pada tahun 2015 di 33 provinsi di Indonesia merupakan inisiatif lain dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu inisiatif atau sumber daya untuk meningkatkan konsumsi ikan dan ketersediaan ikan di masyarakat adalah GEMARIKAN dan FORIKAN.⁴

Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera memiliki potensi yang sangat besar dalam pengelolaan sektor perikanan. Dari

⁴ KKP. (2017). *Analisis indikator kinerja utama kelautan dan perikanan Indonesia: Angka konsumsi ikan* (p. 42).

Kabupaten Pesisir Selatan di selatan hingga Kabupaten Pasaman Barat di utara, garis pantai sepanjang 375 km menopang potensi tersebut. Jika wilayah pesisir Kepulauan Mentawai dimasukkan, maka panjang garis pantainya mencapai 2.420 kilometer.

Wilayah pesisir Sumatera Barat mungkin sangat rentan terhadap kemiskinan struktural. Penduduk di masyarakat pesisir harus menanggung beban yang tidak dapat diperkirakan kapan akan terangkat karena kemiskinan merupakan masalah yang sangat sulit untuk diatasi. Kerentanan dalam berbagai bidang kehidupan dapat ditimbulkan oleh kerentanan sosial ekonomi. Karena nelayan tradisional ini hanya menggunakan perahu tradisional dan alat tangkap sederhana, jelas bahwa mereka tidak akan pernah mampu bersaing dengan nelayan modern yang dibantu oleh teknologi canggih dan kapal-kapal besar yang memiliki jangkauan lebih jauh (Suyanto, 2003; Kusnadi, 2022).

Padahal, potensi perikanan dan kelautan Sumatera Barat (perairan publik dan laut) sangat besar, baik untuk kepentingan komersial maupun konservasi. Potensi tersebut juga dapat menjadi dasar pengembangan di masa mendatang. Berbagai sektor kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berkelanjutan secara ekologis akan mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, kemitraan pemerintah-swasta, kerja sama lembaga dan pemerintah lainnya, dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penerapan peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung peningkatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan. Sektor kelautan

dan perikanan dengan potensi yang sangat besar memiliki peran yang sangat krusial dan strategis dalam pembangunan perekonomian negara, terutama dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha perikanan lainnya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, keberlanjutan, dan ketersediaan sumber daya ikan.

Dalam upaya memberdayakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, selanjutnya dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pada Bagian Kedua tentang Sarana dan Prasarana, pasal 13 yaitu⁵ :

- 1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana, meliputi:
 - a. Prasarana penangkapan ikan; dan
 - b. Prasarana pengolahan dan pemasaran
- 2) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. Stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan;
 - b. Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan;
 - c. Jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan ;
 - d. Alur sungai dan muara;
 - e. Jaringan listrik. Jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
 - f. Tempat penyimpanan berpendingin dan /atau pembekuan.

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

(3) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. Tempat pengolahan ikan;
- b. Tempat pemasaran hasil perikanan;
- c. Jalan distribusi; dan
- d. Instalasi penanganan limbah.

(4) Penyediaan Prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal ini harus berperan sebagai fasilitator, yang menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Untuk mendorong pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, dinas ini juga harus mampu menghubungkan berbagai kepentingan masyarakat nelayan seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam pasal 3 poin a adalah salah satu tujuan adanya perlindungan dan pemberdayaan nelayan adalah untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan nelayan dalam mengembangkan usaha.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat dan

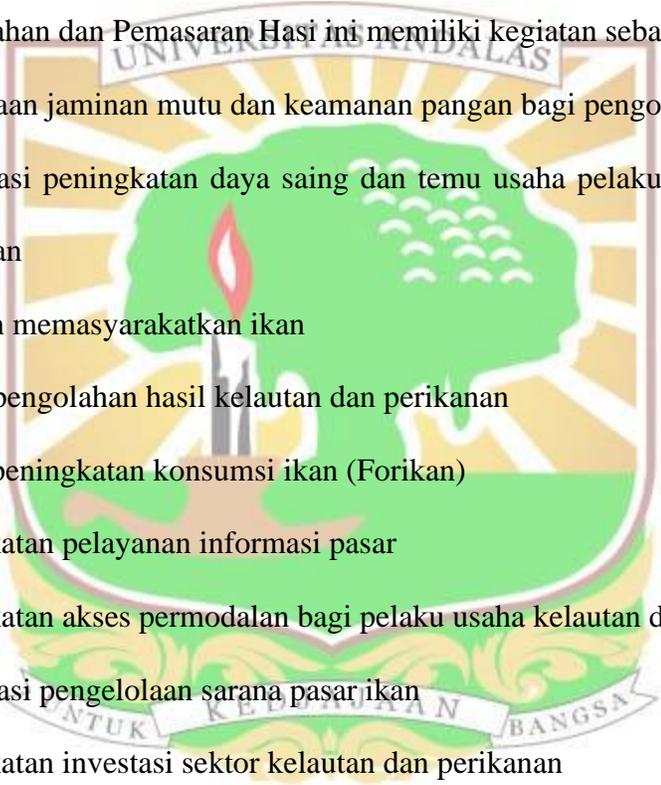
memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 111 tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang Kelautan dan Perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup Provinsi dan Kab/Kota
4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
5. Pelaksanaan tugas dibidang kelautan, Pulau-pulau kecil dan Pengawasan, Perikanan
6. Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Pemasaran
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan merupakan salah satu inisiatif yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

tentang Usaha Pengolahan Ikan menjadi landasan pelaksanaan program ini. Peraturan ini mengatur sejumlah bidang yang terkait dengan pengelolaan dan promosi hasil perikanan.

Dari praproduksi hingga produksi (budidaya dan pemanenan ikan) hingga pascaproduksi (pengolahan dan pemasaran), pengolahan ikan merupakan komponen penting industri perikanan, yang terkait dengan beberapa fase agribisnis perikanan. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil ini memiliki kegiatan sebagai berikut:

- 
1. Pembinaan jaminan mutu dan keamanan pangan bagi pengolah di UPI
 2. Sosialisasi peningkatan daya saing dan temu usaha pelaku pemasaran hasil perikanan
 3. Gerakan memasyarakatkan ikan
 4. Sarana pengolahan hasil kelautan dan perikanan
 5. Forum peningkatan konsumsi ikan (Forikan)
 6. Peningkatan pelayanan informasi pasar
 7. Peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan
 8. Sosialisasi pengelolaan sarana pasar ikan
 9. Peningkatan investasi sektor kelautan dan perikanan
 10. Pameran promosi tingkat Provinsi dan Nasional
 11. Forum koordinasi dan pembinaan kelompok perempuan pesisir dalam rangka kesetaraan gender
 12. Temu usaha pelaku pemasaran hasil perikanan

Dalam melakukan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan tentunya di perlukan anggaran yang mendukung juga. Dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2010 Bab XV mengenai pembiayaan pada pasal 40 bersumber dari:

1. Pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk melaksanakan peraturan daerah ini pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Sumber pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Tabel 1.1
Anggaran Dana Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.437.833.644,-	APBD
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.663.526.401,-	APBD
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	29.820.494.643,-	APBD
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	11.992.215.032,-	APBD
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5.719.844.957,-	APBD
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	5.203.673.774,-	APBD

Sumber: LKjIP tahun 2023 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan APBD telah dialokasikan anggaran Belanja pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan setelah anggaran perubahan Rp. 6.174.007.510,- dan pada tahun 2023 sebesar 5.203.673.774,-.

Dari tabel 1.1 bisa dilihat bahwa anggaran untuk program kerja Program Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yaitu sebanyak Rp. 5.203.673.774,-. Anggaran untuk program kerja ini sendiri berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adapun pembagian anggaran untuk program kerja ini dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Pembagian Anggaran Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

No	Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggaran
A	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.203.673.774
1	Kegiatan Penerbitan Usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	994.451.800
a)	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	994.451.800
2	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.621.702.260

a)	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	323.815.000
b)	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	166.368.700
c)	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	641.493.560
d)	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	490.025.000
3	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.587.519.714
a)	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.587.519.714

Sumber: LAKIP DKP 2023

Dilihat pada tabel diatas, diketahui bahwasanya program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ini memiliki beberapa kegiatan. Dimana kegiatan tersebut tentunya harus ada anggaran agar kegiatannya berjalan. Dan bisa dilihat APBD

untuk program ini sudah dibagi per kegiatannya. Anggaran ini itu ditujukan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat ke Kabupaten/Kota. Tetapi anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk seluruh kabupaten/kota setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran, sesuai dengan yang disampaikan oleh Johandres Daulay, ST M.Si selaku Pembina Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Ahli Muda yaitu:

“Setiap tahunnya hanya beberapa kabupaten/kota saja mendapatkan pelatihan atau bantuan. Dikarenakan anggaran yang ada tidak cukup untuk setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.” (wawancara bersama Johandres Daulay, ST M.Si selaku Pembina Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Ahli Muda pada 4 april 2024)

Dua kegiatan utama dalam program pengolahan dan pemasaran produk perikanan adalah pengolahan ikan dan pemasaran produk perikanan. Namun, pengolahan ikan akan menjadi fokus utama studi ini. Fillet ikan, kerupuk ikan, abon ikan, dan ikan asap adalah contoh produk olahan bernilai tambah yang dibuat dengan mengubah produk perikanan mentah melalui berbagai metode. Pengolahan ini bertujuan untuk memenuhi standar pasar baik untuk pemasaran lokal maupun ekspor, sekaligus meningkatkan daya tarik dan kualitas produk agar sesuai dengan masa simpan.

Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai teknik dan inovasi dalam pengolahan hasil perikanan, termasuk penggunaan teknologi pengolahan yang lebih efisien, peningkatan keterampilan pengolahan bagi masyarakat, serta pemanfaatan bahan baku ikan yang lebih beragam. Lebih lanjut, disini akan membahas tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha pengolahan ikan, seperti keterbatasan modal,

akses terhadap pelatihan keterampilan, serta kendala dalam mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dampak dari program pemberdayaan melalui pengolahan hasil perikanan terhadap peningkatan pendapatan, keterampilan, dan kemandirian masyarakat.

Program ini memiliki capaian indikator sebagai berikut⁶ :

a) Capaian nilai ekspor hasil perikanan (ton)

Harga ikan bervariasi dari waktu ke waktu di berbagai daerah penghasil. Akibatnya, pemasaran ikan segar memerlukan pembagian informasi yang cepat dan akurat antara kota-kota yang memproduksi ikan dan mereka yang mengonsumsinya. Ikan dapat ditemukan dalam jumlah besar dengan harga yang murah di beberapa tempat, tetapi ketersediaannya yang terbatas di tempat lain membuat harganya naik. Langkah-langkah pemrosesan dan pengawetan diperlukan untuk menjamin bahwa ikan yang dipelihara dan ditangkap oleh nelayan tetap sehat dan layak untuk dikonsumsi manusia sampai dikonsumsi. Mengingat ikan merupakan unsur makanan yang rentan membusuk dan rusak, hal ini sangat penting.

Untuk menjaga stabilitas produksi dan ketahanan pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor pengolahan, peningkatan mutu produk perikanan, dan perluasan jaringan serta cakupan pemasaran produk perikanan. Pada tahun 2021, negara-negara yang akan menerima ekspor adalah Amerika Serikat, Bangkok, Guangzhou, Hong Kong, Singapura, Miami, Los Angeles, Tokyo, Manila, Taipie, Kanada, India, Malaysia, Thailand, Jepang,

⁶ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023"

Tiongkok, dan Amerika Serikat. Hal ini dibenarkan oleh Johandres Daulay, ST M.Si

selaku Pembina Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Ahli Muda yaitu :

“Berdasarkan produksinya yaitu produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2023 ada sekitar 500.000 ton pertahun. Jumlah penduduk disumbar 5.700.000 jiwa, dilihat dari tingkat konsumsi ikan perkapita pertahun tahun 2023 itu sebesar 43,08. Kalo dikalikan itu dengan jumlah penduduk berarti kebutuhan ikan kita tu sebesar 247.000.000, dari total produksi perikanan tangkap dan budidaya tadi berarti masih ada setengahnya. Nah, setengahnya ini yang dipasarkan keluar daerah, keluar provinsi bahkan ekspor keluar negeri.” (wawancara bersama Johandres Daulay, ST M.Si selaku Pembina Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Ahli Muda pada 4 april 2024)

Tabel 1.3
Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	5.203.673.774	5.158.425.711	99,13

Sumber: LAKIP DKP 2023

Satu program, yaitu Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan, mendukung upaya untuk memenuhi metrik kinerja ini, Capaian kinerja anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	185,83%	99,13%	99%

Sumber: LAKIP DKP 2023

Grafik yang ditampilkan menunjukkan bahwa infrastruktur, dana, dan sumber daya manusia semuanya telah digunakan secara maksimal untuk mendukung inisiatif dan tindakan yang meningkatkan keberhasilan pemasaran perikanan. Dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,13% dan ukuran kinerja seperti peningkatan nilai ekspor perikanan sebesar 185,53%, tingkat keberhasilan program mencapai 99%. Baik komoditas perikanan diekspor dalam bentuk hidup, segar, dingin, atau olahan, jumlah ekspor perikanan digunakan untuk menentukan nilainya. Ikan pita segar, makarel, lobster, tuna, dan tuna beku merupakan beberapa komoditas utama yang diekspor.

b) Capaian indikator produksi olahan hasil perikanan (%)

Dalam produksi perikanan, pengolahan ikan memiliki dua tujuan yaitu meningkatkan nilai tambah produksi dan menyediakan ketersediaan barang perikanan. Baik operasi penangkapan ikan maupun budidaya berkontribusi pada stabilisasi harga ikan, dan kebutuhan bahan baku bagi perusahaan pengolahan ikan

dapat mendukung produksi, terutama selama musim produksi ikan yang melimpah. Integrasi kegiatan produk perikanan dari penangkapan dan akuakultur dengan perusahaan pengolahan perikanan merupakan ciri khas industri perikanan yang sangat kompetitif.

Tabel 1.5
Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	7,26	7,5	103,30

Sumber: LAKIP DKP 2023

Dengan tingkat capaian sebesar 103,30% atau sangat tinggi, indikator kinerja persentase pertumbuhan output hasil olahan perikanan tahun 2023 berhasil dicapai sebesar 7,5% dari target sebesar 7,26%. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 10.032,64 ton, output hasil olahan perikanan tumbuh sebesar 10.785,09 ton berdasarkan pengukuran indikator kinerja. Informasi produksi ini diperoleh dari output estimasi produksi di setiap kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Data produksi tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.6
Jumlah Produksi (ton) Pengolahan Ikan Tahun 2022-2023

No.	Kab/Kota	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	66,31	71.283,30
2	Kab. Pesisir Selatan	903,48	971.241,00
3	Kab. Solok	59,80	64.285,00
4	Kab. Sijunjung	16,82	18.080,80
5	Kab. Tanah Datar	0,30	322,50
6	Kab. Padang Pariaman	184,24	198.058,60
7	Kab. Agam	639,45	687.408,80
8	Kab. Lima Puluh Kota	357,13	383.910,50
9	Kab. Pasaman	71,20	76.541,10
10	Kab. Solok Selatan	65,36	70.262,00
11	Kab. Dharmasraya	2,97	3.190,30
12	Kab. Pasaman Barat	7.131,70	7.666.577,50
13	Kota Padang	229,31	246.512,60
14	Kota Solok	23,34	25.089,90
15	Kota Sawahlunto	1,68	1.806,10
16	Kota Padang Panjang	0,30	326,80
17	Kota Bukittinggi	39,65	42.623,80
18	Kota Payakumbuh	11,12	11.954,60
19	Kota Pariaman	228,48	245.618,20
	Total	10.032,64	10.785,09

Sumber: LAKIP DKP 2023

Berdasarkan tabel di atas, output olahan hasil perikanan mengalami kenaikan dan penurunan dari Kabupaten/Kota. Kabupaten Pasaman Barat memiliki produksi terbesar yaitu 7.666.577,50 ton, sedangkan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki produksi terendah yaitu sebesar 971.241,00 ton. Harga ikan cenderung berubah seiring waktu di berbagai wilayah produksi. Dengan demikian, ketersediaan informasi

yang akurat dan tepat waktu antara wilayah produksi dan kota konsumen sangat penting bagi keberhasilan pemasaran ikan segar. Ikan dapat tersedia dalam jumlah besar dengan harga yang relatif terjangkau di beberapa tempat, sementara di tempat lain terjadi kelangkaan, yang menyebabkan harga ikan naik. Sebaiknya tetap mengolah ikan agar dapat menarik minat konsumen untuk mencobanya. Adapun olahan ikan di Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.7
Jenis Pengolahan Ikan di Sumatera Barat

No	Jenis Kegiatan	Produk Olahan
1.	Pelumatan daging/Surimi	Bakso ikan
2.	Penggaraman/Pengeringan	Ikan kering
3.	Pengasapan/Pemanggangan	Ikan patin asap, lele asap
4.	Pengolahan lainnya	Kerupuk tulang ikan, otak-otak, rendang tuna, sala lauak, palai bada, kerang lokan rebus, rakik maco, dimsum ikan, serundeng, risoles.

Sumber: DKP Sumbar, 2024

Berdasarkan tabel diatas, bisa dilihat ada beberapa jenis kegiatan pengolahan yaitu pelumatan daging/surimi dengan produk olahan bakso ikan. Penggaraman/pengeringan dengan produk olahan ikan kering, biasanya ikan yang dikeringkan yaitu ikan teri atau ikan budu. Pengasapan/pemanggangan dengan produk olahan ikan patin asap atau lele asap. Sedangkan olahan ikan seperti sala lauak, rendang tuna, dimsum ikan, otak-otak dan lainnya termasuk pada jenis pengolahan lainnya. Dengan adanya jenis kegiatan pengolahan seperti ini membantu hasil perikanan Sumatera Barat yang banyak ini. Hasil perikanan yang ada di

Sumatera Barat yang dapat diolah yaitu ikan tuna, cakalang, tongkol, tenggiri, kerapu, kakap, udang, cumi-cumi, lele, patin, gurami, dan lain-lainnya. Dengan begitu, tentu ada tempat untuk melakukan pengolahannya yang disebut dengan Unit Pengolahan Ikan. Adapun jumlah unit pengolahan ikan yang ada di Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.8
Jumlah Unit Pengolahan Ikan Di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No.	Kab/Kota	Jumlah UPI
1	Kota Padang	6
2	Kota Pariaman	7
3	Kota Bukittinggi	8
4	Kota Padang Panjang	3
5	Kota Payakumbuh	4
6	Kota Solok	3
7	Kota Sawahlunto	6
8	Kabupaten Agam	32
9	Kabupaten Padang Pariaman	24
10	Kabupaten Lima Puluh Kota	10
11	Kabupaten Tanah Datar	11
12	Kabupaten Solok	19
13	Kabupaten Solok Selatan	4
14	Kabupaten Sijunjung	6
15	Kabupaten Dharmasraya	7
16	Kabupaten Pasaman	16
17	Kabupaten Pasaman Barat	8
18	Kabupaten Pesisir Selatan	24
19	Kabupaten Mentawai	6

Sumber: Buku Direktori 2021

Jika dilihat pada tabel diatas, data mengenai jumlah unit pengolahan ikan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat menunjukkan gambaran yang menjanjikan tentang potensi sektor perikanan di wilayah tersebut. Dengan total 204 unit yang tersebar secara merata di berbagai kabupaten dan kota, sektor perikanan menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian lokal. Kabupaten Agam menjadi pusat aktivitas pengolahan ikan dengan jumlah unit tertinggi, sementara Kota Padang Panjang dan Kota Solok memiliki jumlah pengolahan ikan yang rendah. Penyebab utamanya kemungkinan adalah variasi kondisi iklim. Dengan akses ke perikanan air tawar dan laut, Kabupaten Agam memiliki sumber daya alam yang melimpah. Disini tradisi pengolahan ikan sudah ada sejak lama, seperti pengasapan, pembuatan ikan asin, dan kerupuk ikan, yang turut serta memperkuat posisi Kabupaten Agam sebagai pusat pengolahan ikan. Hal ini dibenarkan oleh Yuliesi A.md selaku Analisis Pasar Hasil Perikanan, yaitu:

“Mungkin karena daerahnya, seperti di maninjau kan ada rinuak jadi pelaku usaha itu dia berminat membangun usahanya. Dan ditiku juga ada laut, ada kerupuk raki maco, sala, rendang lokan, sebenarnya agam ini termasuk spesifik, masalahnya kita ada laut dan danau. Kalo daerah danau, upi kita itu lebih spesifik ikan local seperti rinuak. Kalo daerah tiku, kita ada laut, kalo dilaut itu ikan laut aja yang ada, kerang-kerang laut atau lokan. Termasuk olahanya yaitu seperti ikan salai. Dengan seperti itu makanya makin berkembang unit pengolahan ikan ini.” (wawancara bersama Yuliesi, A.md selaku Analisis Pasar Hasil Perikanan pada 3 oktober 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut, Kabupaten Agam merupakan daerah yang strategis karena daerah ini memiliki perairan laut dan danau sehingga seharusnya

hasil perikanannya banyak dibandingkan daerah-daerah lainnya. Tapi bisa dilihat produksi olahan yang paling banyak yaitu terletak di Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan Kabupaten Agam menjadi nomor 3 paling banyak produksi olahan ikannya, padahal unit pengolahannya lebih banyak dibandingkan daerah Pasaman Barat. Adanya unit-unit pengolahan ikan tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan infrastruktur pendukung dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan adanya distribusi yang merata, upaya pemerataan ekonomi di seluruh provinsi dapat terwujud. Dengan demikian, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi yang besar untuk terus mengembangkan sektor perikanan sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi, dengan dukungan pengembangan kapasitas produksi, diversifikasi produk, dan penerapan teknologi yang lebih canggih.

Pada penelitian ini, peneliti menganalisa fenomena menggunakan konsep tahapan pemberdayaan Kartasmita yakni *enabling*, *empowering* dan *protecting*. Pada tahap *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang mendorong tumbuh kembangnya potensi masyarakat. Dimana industri perikanan mempunyai potensi paling besar. Ikan seperti tuna, cakalang, rinuak, dan kakap, serta udang, cumi, dan rumput laut melimpah di Laut Sumatera Barat. Perikanan ini memiliki potensi yang sangat besar, baik untuk ekspor maupun konsumsi dalam negeri, dan dapat meningkatkan perekonomian lokal secara signifikan. Budidaya perikanan dapat dikembangkan selain perikanan tangkap, khususnya di wilayah pesisir yang kondisinya mendukung untuk produksi rumput laut dan budidaya ikan. Hal tersebut

bisa dilihat pada produksi perikanan budidaya dan tangkap setiap tahunnya, sebagai berikut:

Tabel 1.9
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Di Sumatera Barat

Tahun	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya
2020	-	245.498,40
2021	212.520,50	261.573,39

Sumber: DKP Sumbar

Berdasarkan tabel 1.7 dapat dilihat bahwa hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Sumatera Barat secara keseluruhan dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dengan peningkatan yang signifikan dalam perikanan tangkap dan budidaya, industri perikanan di Sumatera Barat telah menunjukkan peningkatan yang baik dalam beberapa tahun terakhir.

Tahap *empowering*, yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mengadakan pelatihan kepada pelaku UPI. Dimana pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pelaku UPI untuk terus meningkatkan hasil olahan ikan sehingga usahanya akan terus berlanjut. Hal ini juga dibenarkan oleh Johandres Daulay, ST M.Si selaku Kasi Pembina Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Ahli Muda yaitu :

“Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pelatihan untuk meningkatkan produk olahan perikanan menjadi ragam olahan yang baru. Jadi tidak monoton dan itu-itu saja. Dengan adanya ragam olahan baru, mereka bisa mencoba membuat produk olahan baru dan tentu bisa menambah *income* juga bagi masyarakat. Dalam pelatihan itu biasanya kita undang narasumber-narasumber profesional seperti

chef. Jadi narasumber tersebut diundang langsung, bagaimana kita mengolah produk-produk kekinian yang mungkin banyak diminati anak-anak muda, masyarakat lainnya. Selain itu kita juga kita berupaya bagaimana menciptakan interpreneur baru, dengan kita latih dengan memberikan pengetahuan yang lain seperti kewirausahaan, motivasi diri dan lain sebagainya yang bermanfaat sehingga timbul minatnya untuk meningkatkan olahannya yang bisa bersaing dengan produk-produk olahan yang lain.” (wawancara bersama Johandres Daulay, ST M.Si selaku Pembina Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Ahli Muda pada 4 april 2024)

Kegiatan yang mendukung kutipan tersebut yaitu:



Salah satu mitra dalam Program Ciptakan 100.000 Wirausaha adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang memberikan pelatihan di bidang pengolahan ikan. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2002 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pelaksanaan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat, program ini dimaksudkan untuk membantu pencapaian inisiatif utama provinsi tersebut. Tujuan utama program ini adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021–2026. Untuk itu, program ini bertujuan

untuk membina para pelaku usaha di berbagai kabupaten dan kota dalam rangka menciptakan 100.000 wirausahawan, termasuk wirausaha perempuan dan wirausaha milenial.⁷

Dalam pelatihan ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menghadirkan narasumber profesional dibidangnya. Dimana materi pelatihan yang diberikan yaitu digital marketing dari *marceting panner* oleh salah satu pemilik Minang Lipp, dilanjutkan dengan strategi *branding* dan masukan citra produk dari seorang *brand activator* berpengalaman, masukan membangun usaha dari pemilik Dendeng Balado *Food* yang pemasaran produknya sudah sampai Taiwan, strategi komunikasi dan lobi Mind Inspira dari seorang motivator Pekanbaru, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan peluang mentoring inkubator bisnis dari UPT Kewirausahaan Universitas Negeri Padang. Aspek terpenting dari prosedur pengelolaan NIB/izin usaha DMPPTSP Sumbar adalah praktik pengolahan makanan siap saji dan makanan modern berbahan dasar ikan, termasuk hingga enam jenis resep olahan dan analisis usaha. Dua koki profesional dari Jakarta, Chef Muto dan Chef Asep, seorang koki eksekutif yang berpengalaman di beberapa hotel bintang lima di Jakarta, yang memberikan pelatihan langsung di bidang ini.

Tahap *Protecting* yakni melibatkan perlindungan terhadap hak, keamanan dan kesejahteraan. Agar Unit Pengolahan Ikan dapat beroperasi secara sah dan berkelanjutan serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Dinas

⁷ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, “DKP Adakan Pelatihan Pengolahan Ikan Guna Ciptakan 100.000 Enterpreneur di Sumbar” (Padang, 2023), <https://dkp.sumbarprov.go.id/home/berita/122/dkp-adakan-pelatihan-pengolahan-ikan-guna-ciptakan-100-000-enterpreneur-di-sumbar.html>

Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat memberikan izin usaha untuk penjualan dan pengolahan hasil perikanan. Dimana penerbitan izin usaha tersebut sudah ada di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 17/PERMEN-KP/2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan pada Bab 1, pasal 1 ayat 3, berbunyi:

Sertifikat kelayakan pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.⁸

Selanjutnya dalam pasal 10, yaitu:

Sertifikat Pengolah Ikan yang selanjutnya disingkat SPI adalah sertifikat yang menerangkan bahwa seseorang telah memiliki keterampilan dalam bidang teknologi Pengolahan Ikan dan manajemen mutu hasil Perikanan.

Hasilnya, fasilitas pengolahan ikan yang memenuhi persyaratan operasi yang ditetapkan diberikan sertifikat kelayakan pengolahan. Sedangkan sertifikat pengolahan ikan merupakan dokumen yang menjelaskan bahwa seseorang tersebut mampu atau paham dibidang pengolahan ikan. Sertifikat ini bertujuan untuk melindungi hak unit pengolahan ikan baik itu hak penggunaan sumber daya dan hak atas keamanan operasional dari gangguan eksternal yang mungkin terjadi.

Inisiatif pengolahan dan pemasaran hasil perikanan telah membuahkan hasil yang cukup membanggakan. Dinas Kelautan dan Perikanan telah berhasil mencapai

⁸ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

sejumlah prestasi penting pada tahun 2021 sebagai hasil kerja keras dan upaya untuk mengembangkan industri kelautan dan perikanan di Sumatera Barat. Salah satu prestasi tersebut adalah diterimanya penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang sekaligus sebagai Ketua Forikan Provinsi Sumatera Barat atas peran sertanya dalam mendukung upaya daerah dalam meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.⁹

Selain itu, Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih juara favorit pada acara lomba masak serba ikan tingkat nasional dalam rangkaian peringatan ke-9 Hari Ikan Nasional (Harkannas) yang diberikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tengah pada tanggal 21 November 2022.¹⁰

Pendorong utama perluasan program pengolahan ini adalah perolehan produksi ikan olahan dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui pelaksanaan inisiatif seperti pembelian gemarikan dan bazar atau acara promosi lainnya. Namun, sejumlah tantangan masih ada dalam memastikan keberlanjutan usaha pengolahan ikan ini. Minimnya sumber daya manusia pengolahan ikan, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai menu unggas dan daging, belum semua orang mengonsumsi ikan dengan standar yang tepat, dan masih banyaknya masyarakat yang memilih komoditas lain untuk dikonsumsi merupakan tantangan dalam beberapa tahun terakhir.¹¹

⁹ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021”

¹⁰ Padangkita, “Sumbar Juara Favorit Lomba Masak Serba Ikan Nasional Peringatan Harkannas 2022”

¹¹ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023”

Sesuai dengan uraian sebelumnya, maka peneliti melakukan penelitian dan menghimpunnya menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat."

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan permasalahan yang telah dirumuskan yaitu mengenai Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengolahan Ikan dan Pemasaran Hasil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan data atau referensi bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat dengan lebih memperhatikan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan dan pemasaran produk perikanan. Selain itu, peneliti lain yang meneliti subjek terkait dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai acuan.

